

Daftar Pustaka

Buku

Ali, Zainuddin, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

Ashiddiqie, Jimly, 2005, *Model-model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara*, Konstitusi Press, Jakarta.

_____, 2010, *Konstitusi Ekonomi*, Kompas, Jakarta.

_____, 2010, *Perihal Undang-Undang*, Rajagrafindo Persada, Jakarta.

Diantha, I Made Pasek, 2017, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta.

Friedmann, W., 1960, *Legal theory*, Steven and Sons Limited, London, diterjemahkan Muhammad Arifin, 1990, *Teori dan Filsafat Hukum : Idealisme Filosofis dan Problema Keadilan (Susunan II)*, Rajawali Pers, Jakarta.

Hadjon, Philipus M., et al., 2002, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.

Harahap, Nursapia, 2020, *Penelitian Kualitatif*, Cetakan Pertama, Wal Ashri Publishing, Medan.

Hoesein, Zainal Arifin, 2013, *Judicial Review di Mahkamah Agung RI Tiga Dekade Pengujian Peraturan Perundang-Undangan*, Cetakan Kedua PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Kusnardi, Moh. dan Harmaily Ibrahim, 1988, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Pusat Studi Hukum Tata Negara, Jakarta.

Manan, Bagir dan Kuntana Magnar, 1997, *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia*, Alumni, Bandung.

Marbun, S.F. dan Moh. Mahfud. M.D., 2009, *Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara*, Liberty, Yogyakarta.

Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Prenada Media, Jakarta.

Mertokusumo, Sudikno, 1993, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.

_____, 1996, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.

_____, 2014, *Mengenal Hukum : Suatu Pengantar*, Cetakan kelima, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta

Nalle, Victor Imanuel W., 2013, *Konsep Uji Materiil : Kajian Pembentukan dan Uji Materiil Peraturan Kebijakan di Indonesia*, Setara Press, Malang.

Panggabean, Henry P., 2002, *Fungsi Mahkamah Agung dalam Praktik Sehari-hari*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.

Prakoso, Djoko, 2002, *Peradilan Tata Usaha Negara UU No. 5/1986*, Liberty, Yogyakarta.

Rasyid, Laila M. dan Herinawati, 2015, *Pengantar Hukum Acara Perdata*, Unimal Press, Lhokseumawe.

Sekretariat Jenderal MPR RI, 2020, *Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia*, Sekretariat Jenderal MPR RI, Jakarta.

Sibuea, Hotma P., 2010, *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik*, Erlangga, Jakarta.

Sihombing, Eka N.A.M dan Ali Marwan Hsb, 2017, *Ilmu Perundang-Undangan*, Pustaka Prima, Medan.

Soeprapto, Maria Farida Indrati, 2002, *Ilmu Perundang-Undangan : Dasar-dasar dan Pembentukannya*, Cetakan kelima, Kanisius, Yogyakarta.

Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Sunggono, Bambang, 2007, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Yusron, Nurulita, 2008, *Dasar-Dasar Hukum Normatif : Prinsip-prinsip Teoritis untuk Mewujudkan Keadilan dalam Hukum dan Politik*, Nusa Media, Bandung terjemahan dari Hans Kelsen, 1957, *What is Justice?: Justice, Politic, and Law in the Mirror of Science*, University of California Press.

Artikel Jurnal

Butarbutar, Elisabeth Nurhaini, “Asas *Nebis in Idem* dalam Gugatan Perbuatan Melawan Hukum”, *Jurnal Yudisial*, Vol. 11, No. 1, April 2018.

Disantara, Fradhana Putra, “Perspektif Keadilan Bermartabat dalam Paradoks Etika dan Hukum”, *Jurnal Litigasi*, Vol. 22, No. 2, Oktober 2021.

Eric dan Wening Anggraita, “Perlindungan Hukum atas Dikeluarkannya Peraturan Kebijakan (Beleidsregel)”, *Jurnal Komunikasi Hukum*, Vol. 7, No. 1, Februari 2021.

Ibrahim, Mohammad, “Indonesia’s Supreme Court Judgment on Religious Clothing: Failing Women and Girls in Public Schools?”, *Oxford Journal of Law and Religion*, Vol. 10, Issue. 3, November 2021.

Nalle, Victor Imanuel W., “Kewenangan Yudikatif dalam Pengujian Peraturan Kebijakan”, *Jurnal Yudisial*, Vol. 6, No. 1, April 2013.

Prayogo, R. Tony, “Penerapan Asas Kepastian Hukum dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil dan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Pengujian Undang-Undang”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 13, No. 2, Juni 2016.

Septiyansah, Zainal B., dan Muhammad Ghalib, “Konsepsi Utilitarianisme dalam Filsafat Hukum dan Implementasinya di Indonesia”, *Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Vol. 34, No. 1, Juni 2018.

Sudiyana dan Suswoto, “Kajian Kritis terhadap teori Positivisme Hukum dalam Mencari Keadilan Substantif”, *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol. 11, No. 1, Mei 2018.

Widarto, Joko, “Penerapan Asas Putusan Hakim Harus Dianggap Benar (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013)”, *Lex Jurnalica*, Vol. 13, No. 1, April 2016.

Hasil Penelitian Tugas Akhir

Muthalib, Muhammad Thabrani, 2017, Kewenangan Pengadilan Menguji Norma Peraturan Kebijakan (*Beleidsregel*) di Indonesia, *Tesis*, Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.

Effendi, Maftuh, 2013, Kewenangan Uji Materiil Peraturan Perundang-Undangan di bawah Undang-Undang (Kajian tentang Putusan Mahkamah Agung Tahun 2005-2011), *Laporan Penelitian*, Pusat Penelitian dan Pengembangan Mahkamah Agung RI, Jakarta.

Oloan, Michael Joshua, 2019, Pengujian Surat Edaran oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia (Studi Kasus : Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2009 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 48 P/HUM/2016), *Skripsi*, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Parenrengi, Rajif R., 2023, Batas Ekstremitas Ketidakadilan Hukum menurut Pemikiran Radbruch-Alexy (Analisis Pasal 1 Undang-Undang No. 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama), *Skripsi*, Program Studi Perbandingan Madzhab Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta.

Saputra, Rijal, 2013, Tinjauan Yuridis Kedudukan Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, *Skripsi*, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar.

Internet

Ardiansyah, Rahmad, “Isi Maklumat No. X, 16 Oktober 1945”, *idsejarah.net*, 29 November 2018, <https://idsejarah.net/2018/11/maklumat-no-x-16-oktober-1945.html>, diakses 5 November 2023.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) *online/daring* (dalam jaringan), <https://kbbi.web.id>.

Lase, Marinus, “Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan”. aksarahukum.com, 26 Agustus 2021, <https://www.aksarahukum.com/2021/08/asas-tiada-pidana-tanpa-kesalahan.html>, diakses 1 Januari 2024.

Moeliono, Tristam P. dan Tanius Sebastian, “Tendensi Reduksionis dan Utilitarianis dalam Ilmu Hukum Indonesia : Membaca Ulang Filsafat Hukum Gustav Radbruch”, https://repository.unpar.ac.id/bitstream/handle/123456789/3174/maklhsc250_Tristam%20Meoliono_Tendensi%20Reduksionis%20dan%20Utilitarianis-p.pdf?sequence=1&isAllowed=y, diakses 4 Januari 2024.

Munawaroh, Nafiatul, “7 Asas Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara”, hukumonline.com, 28 Juli 2023, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/7-asas-hukum-acara-peradilan-tata-usaha-negara-lt62d5370e455c4>, diakses 23 Desember 2023

Rositawati, Dian, “Judicial Review”, Seri Bahan Bacaan Kursus HAM untuk Pengacara XI Tahun 2007, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, Jakarta, <https://referensi.elsam.or.id/wp-content/uploads/2014/09/Judicial-Review.pdf>, diakses 20 Juni 2023.

Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Hak Uji Materiil.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2016 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1035).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781).

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958).

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358).

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3344).

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4359).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4380).

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801).

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316).

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6398).

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316).

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601).

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5079).

Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 P/HUM/2014 perihal pengujian Keputusan Gubernur Kepulauan Riau No : 984 Tahun 2013 tentang Penetapan Upah Minimum Kota (UMK).

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 P/HUM/2016 perihal pengujian SE Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 5 Tahun 2010 tentang Pendataan Tenaga Honorer yang Bekerja di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 P/HUM/2017 perihal pengujian PP No. 10 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil *juncto* Angka Romawi II Angka (13) dan Angka (14) Surat Edaran Badan Administrasi Kepegawaian Negara (SE BAKN) No.

48/SE/1990/Tahun 1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan PP No. 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas PP No. 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 P/HUM/2012 perihal pengujian Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP-158/D.P2TKLN/III/2005 tentang Komponen dan Besarnya Biaya Tenaga Kerja Indonesia ke Taiwan.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 8 P/HUM/2019 perihal pengujian SK Direksi PT BRI (Persero) Tbk No.Kep: S.27-DIR/SDM/05/2005 tentang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 16 P/HUM/2019 perihal pengujian Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.465/Menhut-II/2011 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan menjadi Bukan Kawasan Hutan seluas ± 110.105 (seratus sepuluh ribu seratus lima) hektar di provinsi Sulawesi Tenggara.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 17 P/HUM/2021 perihal pengujian Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Agama No. 02/KB/2021, No. 025-199 Tahun 2021, No. 219 Tahun 2021 tentang Penggunaan Pakaian Seragam dan Atribut bagi Peserta Didik, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan di Lingkungan Sekolah yang Diselenggarakan Pemerintah Daerah pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah. Menurut penulis, putusan ini mengedepankan kemanfaatan bagi masyarakat hukum adat Minangkabau.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 22 P/HUM/2012 perihal pengujian SE Direktorat Jenderal Pajak Nomor SE-118/PJ/2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Air Bersih.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 22 P/HUM/2015 perihal pengujian Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.244/Menhut-II/2011 tentang Pelepasan Sebagian Kawasan Hutan Produksi Sipirok Untuk Pembangunan Pertapakan Kantor Bupati Tapanuli Selatan dan Sarana Prasarana Lainnya Atas Nama Bupati Tapanuli Selatan Yang Terletak di Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara, Seluas 271,10 (dua ratus tujuh puluh satu dan sepuluh perseratus) Hektar.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 26 P/HUM/2016 perihal pengujian Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.878/Menhut-II/2014 dan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK. 314/MENLHK/SETJENPLA.2/4/2016.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 29 P/HUM/2014 perihal pengujian Keputusan Menteri Keuangan No. KEP-545/KM.10/2011 tentang Pengesahan Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun IPTN.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 36 P/HUM/2011 perihal pengujian Keputusan Bersama Ketua MA dan Ketua KY No. 047/KMA/SKB/IV/2009 No. 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 42 P/HUM/2017 perihal pengujian Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.579/Menhut-II/2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Utara.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 46 P/HUM/2013 perihal pengujian Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 814.1/169/SJ tentang Penegasan Larangan Pengangkatan Tenaga Honorer.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 53 P/HUM/2017 perihal pengujian Keputusan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor Kep/200/III/2017 tentang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kepolisian Militer di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 54 P/HUM/2015 perihal pengujian Keputusan Gubernur Banten, Nomor: 561/ Kep.345-Huk/2015 tentang Upah Minimum Sektoral Kota (UMSK).

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 55 P/HUM/2014 perihal pengujian Keputusan Menteri Kehutanan No. 173/Kpts-II/1986 tentang Penunjukan Areal Hutan di Wilayah Provinsi Dati I Riau sebagai Kawasan Hutan.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 62 P/HUM/2017 perihal pengujian SK Direksi PT BRI (Persero) Tbk., NoKep:883-DIR/KPS/10/2012 tentang Penyelesaian Kewajiban Perusahaan terhadap Pekerja yang Berakhir Hubungan Kerjanya karena Mencapai Usia Pensiun Normal sebagai Implementasi dari UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 69 P/HUM/2013 perihal pengujian Nota Kesepahaman antara KPU dengan Lembaga Sandi Negara No. 19/KB/KPU/2013 dan No. PERJ.400/SU/KH.02.01/09/2013.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 72 P/HUM/2014 MA menyatakan bahwa objek permohonan hak uji materiil yaitu Keputusan Gubernur Jawa Barat No. 571/Kep.1636-Bangsos/2013 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Barat.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No. 6/PUU-III/2005 perihal pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 perihal pengujian UU No. 56 Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 110-111-112-113/PUU-VII/2009 perihal pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dokumen Hukum Lainnya

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2, dan Level 1 *Corona Virus Disease* 2019 di wilayah Jawa dan Bali.

Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Agama No. 02/KB/2021, No. 025-199 Tahun 2021, No. 219 Tahun 2021 tentang Penggunaan Pakaian Seragam dan Atribut Bagi Peserta Didik, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan di Lingkungan Sekolah yang Diselenggarakan Pemerintah Daerah Pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali dalam Perkara Pidana.

Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Agama No. SJ/B.VIII/2/HM.00/1558/2017 tentang Kebijakan Penggunaan Internet dan Intranet di Lingkungan Kementerian Agama.